



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: AHU-11537.AH.01.02.Tahun 2009
TENTANG
PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model II dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 02, tanggal 2 Januari 2009 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Dra. Prastiwi, SH dan diterima pada tanggal 6 April 2009, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Menyetujui perubahan anggaran dasar PT. SOMATRA POLA REKA SARANA, NPWP 01.696.910.7-501.001, berkedudukan di Tegal - Kabupaten Tegal karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model II yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta Nomor 02, tanggal 2 Januari 2009 yang dibuat oleh Notaris Dra. Prastiwi, SH berkedudukan di Kabupaten Slawi.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 07 April 2009

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PLH. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Prof. ABDUL BARI AZED, SH, MH
NIP. 130 610 869

Daftar Perseroan Nomor AHU-0014661.AH.01.09.Tahun 2009 Tanggal 07 April 2009

Sertifikat atau Lisensi yang Masih Berlaku dari Direktorat jenderal kekayaan Intelektual Kemenkumham dalam pembangunan Gedung Rehab Medik, Geriatri dan Pelayanan Terpadu



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
RSUD dr. SOESELO

Alamat : Jln. Dr. Sutomo No.63 Slawi Kabupaten Tegal,
Tlp. (0283) 491016491761, Fax.491016 Slawi 52419
Website:www.rsudsoeselo.tegalkab.go.id, E-mail: kontak@rsudsoeselo.com



SURAT PERNYATAAN

Mendasari Monev Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 bahwa pada pekerjaan Biaya Jasa Kebersihan Rumah Sakit pada RSUD dr. Soeselo kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 tidak terdapat dokumen antara lain :

| No | Jenis Dokumen | Keterangan |
|----|---|---|
| 1 | Dokumen tentang pengadaan barang dan jasa tahun 2023 yang sekurang-kurangnya memuat 1)Nama lelang 2)Tanggal pembuatan 3)Lingkup pekerjaan 4)Tahapan lelang 5)Metode pengadaan 6)Tahun anggaran 7)Nilai pagu paket dan HPS 8)Lokasi pekerjaan 9)Syarat Kualifikasi | Mengingat pekerjaan tersebut termasuk dalam pengadaan jasa kebersihan RS melalui pembelian secara elektronik, maka hanya mengumumkan informasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) |
| 2 | Rancangan Kontrak | Mengingat pekerjaan tersebut termasuk dalam pengadaan jasa kebersihan RS melalui pembelian secara elektronik, maka menggunakan surat perjanjian dan bukan rancangan kontrak |
| 3 | Dokumen persyaratan penyedia atau lembar data kualifikasi | Mengingat pekerjaan tersebut termasuk dalam pengadaan jasa kebersihan RS melalui pembelian secara elektronik, maka tidak terdapat dokumen persyaratan penyedia atau lembar data kualifikasi |

| No | Jenis Dokumen | Keterangan |
|----|--|--|
| 4 | Dokumen persyaratan proses pemilihan atau lembar data pemilihan | Mengingat pekerjaan tersebut termasuk dalam pengadaan jasa kebersihan RS melalui pembelian secara elektronik, maka tidak terdapat dokumen persyaratan proses pemilihan atau lembar data pemilihan |
| 5 | Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan | Mengingat pekerjaan tersebut termasuk dalam pengadaan jasa kebersihan RS melalui pembelian secara elektronik, maka tidak terdapat jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan |
| 6 | Gambar rancangan pekerjaan | Mengingat pekerjaan tersebut termasuk dalam pengadaan jasa kebersihan RS melalui pembelian secara elektronik, maka tidak terdapat gambar rancangan pekerjaan |
| 7 | Dokumen studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan | Mengingat pekerjaan tersebut termasuk dalam pengadaan jasa kebersihan RS melalui pembelian secara elektronik, maka tidak terdapat dokumen studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan |
| 8 | Sertifikat atau lisensi yg masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | Mengingat pekerjaan tersebut termasuk dalam pengadaan jasa kebersihan RS melalui pembelian secara elektronik, maka tidak terdapat Sertifikat atau lisensi yg masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia |

Surat Keterangan Tidak ada Sertifikat atau Lisensi yang Masih Berlaku dari Direktorat jenderal kekayaan Intelektual Kemenkumham dalam Pengadaan Jasa Kebersihan Melalui Metode e-purchasing

| No | Jenis Dokumen | Keterangan |
|----|--|---|
| 9 | Berita acara pemberian penjelasan | Mengingat pekerjaan tersebut termasuk dalam pengadaan jasa kebersihan RS melalui pembelian secara elektronik, maka tidak terdapat berita acara pemberian penjelasan |
| 10 | Berita acara sanggah dan sanggah banding | Pada pekerjaan tersebut penyedia tidak melakukan sanggah |
| 11 | Berita acara penetapan atau pengumuman penyedia | Mengingat pekerjaan tersebut termasuk dalam pengadaan jasa kebersihan RS melalui pembelian secara elektronik, maka dokumen berupa Berita Acara Hasil Pengadaan Metode E-Purchasing |
| 12 | Laporan hasil pemilihan penyedia | Sudah tercantum dalam Berita Acara Hasil Pengadaan Metode E-Purchasing |
| 13 | Surat Perjanjian Kemitraan | Pelaksanaan pekerjaan tidak mengenal Surat Perjanjian Kemitraan |
| 14 | Surat Perjanjian Swakelola | Mengingat pekerjaan tersebut termasuk dalam pengadaan jasa kebersihan RS melalui pembelian secara elektronik, maka tidak terdapat surat perjanjian swakelola |
| 15 | Surat penugasan atau surat pembentukan tim swakelola | Mengingat pekerjaan tersebut termasuk dalam pengadaan jasa kebersihan RS melalui pembelian secara elektronik, maka tidak terdapat surat penugasan atau surat pembentukan tim swakelola |
| 16 | Nota Kesepahaman atau <i>Memorandum of Understanding</i> | Mengingat pekerjaan tersebut termasuk dalam pengadaan jasa kebersihan RS melalui pembelian secara elektronik, maka menggunakan surat perjanjian dan tidak terdapat dokumen Nota Kesepahaman atau <i>Memorandum of Understanding</i> |

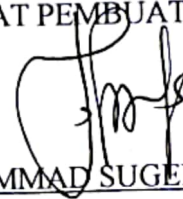
| No | Jenis Dokumen | Keterangan |
|----|-------------------------------|---|
| 17 | Surat Perintah Mulai Kerja | Mengingat pekerjaan tersebut termasuk dalam pengadaan jasa kebersihan RS melalui pembelian secara elektronik, maka tidak terdapat Surat Perintah Mulai Kerja |
| 18 | Surat Jaminan Pelaksanaan | Mengingat pekerjaan tersebut termasuk dalam pengadaan jasa kebersihan RS melalui pembelian secara elektronik, maka tidak terdapat Surat Jaminan Pelaksanaan |
| 19 | Surat Jaminan Uang Muka | Mengingat pekerjaan tersebut termasuk dalam pengadaan jasa kebersihan RS melalui pembelian secara elektronik, maka tidak terdapat Surat Jaminan Uang Muka |
| 20 | Surat Jaminan Pemeliharaan | Mengingat pekerjaan tersebut termasuk dalam pengadaan jasa kebersihan RS melalui pembelian secara elektronik, maka tidak terdapat Surat Jaminan Pemeliharaan |
| 21 | Surat Tagihan | Mengingat pekerjaan tersebut termasuk dalam pengadaan jasa kebersihan RS melalui pembelian secara elektronik, maka tidak terdapat Surat Tagihan |
| 22 | Surat Perintah Membayar | Mengingat pekerjaan tersebut termasuk dalam pengadaan jasa kebersihan RS melalui pembelian secara elektronik, maka tidak terdapat Surat Perintah Membayar |
| 23 | Surat Perintah Pencairan Dana | Mengingat pekerjaan tersebut termasuk dalam pengadaan jasa kebersihan RS melalui pembelian secara elektronik, maka tidak terdapat Surat Perintah Pencairan Dana |

| No | Jenis Dokumen | Keterangan |
|----|--------------------------------|---|
| 24 | Laporan Pelaksanaan Pekerjaan | Sudah tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan |
| 25 | Laporan Penyelesaian Pekerjaan | Sudah tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan |

Untuk dan atas nama

RSUD dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



MUHAMMAD SUGENG, S.ST, MM

NIP. 19750703 199703 1 007